



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS TENAGA KERJA



P-RENJA TAHUN 2025



disnaker.smd@gmail.com

www.disnaker.samarindakota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kepada Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayatnya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2025, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2025-2029, kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi misi. Adapun visi misi Walikota Terpilih adalah

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”
-Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul-

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 masih banyak kekurangan, namun demikian kami berharap dengan penyusunan P-Renja 2025 ini dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan kami laksanakan pada Tahun 2025.

Akhirnya atas nama Jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan P-Renja Tahun 2025.

Plt.Kepala Dinas,



SOFYAN ADY WIJAYA, S.Sos., MSI
Pembina TK.I IV/b
NIP. 196907222000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencaanaa Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja	10
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA	
3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan	45
BAB IV. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kota Samarinda.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2025 merupakan rencana kerja tahun penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2021-2026. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan

program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Disisi lain Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, dan akan dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana APBD.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2024;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04).

21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur : 64.72/I/18/2/2021);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2025.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh dinas tenaga kerja kota samarinda.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 yaitu disebabkan karena adanya keadaan yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan, penambahan atau pengurangan target dan pagu kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat skala prioritas. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif.

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan perkembangan dan perubahan keadaan, penyusunan perkiraan perubahan atas RKPD Tahun Anggaran 2025, apabila terjadi :

1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

1.4.1. PDRB Kota Samarinda

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II-2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp221,77 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp147,96 triliun.

”Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II-2025 terhadap Triwulan II-2024 tumbuh sebesar 4,69 persen (y-on-y),”terang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025). dari sisi produksi, Lapangan Usaha

Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,12 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,18 persen. "Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II-2025 terhadap Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 2,26 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,75 persen. Ekonomi Kalimantan Timur Semester I-2025 dibanding Semester I-2024 tumbuh sebesar 4,39 persen (c-to-c). Ekonomi Pulau Kalimantan pada Triwulan II-2025 tumbuh positif sebesar 4,95 persen (y-on-y). Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan nilai tambah regional Kalimantan sebesar 46,58 persen.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi terhadap ekonomi, yaitu sebesar 34,11 persen, kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 15,12 persen.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat/ menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan ang disertai dengan gambaran perubahan kerangka ekonomi.

BAB II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat kompilasi hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan diaanggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV. Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II EVALASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 sebesar 15.095.472.959,- (*Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) pada triwulan I tereliasasi sebesar 6.454.122.426,- (*Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) dijabarkan pada tabel berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda														
2	7					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		15,095,472,959			2,378,662,648			4,075,459,778		6,454,122,426		6,454,122,426	534.33	42.76
2	7	2				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		136,399,000			4,723,450			61,533,749		66,257,199		66,257,199	50	48.58
2	7	2				Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Dokumen			0.25			0.25		0.5				50	
2	7	2	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		136,399,000			4,723,450			61,533,749		66,257,199		66,257,199	50	48.58
2	7	2	2.01			Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0.25			0.25		0.5				50	
2	7	2	2.01	1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		136,399,000	PAD		4,723,450	PAD		61,533,749		66,257,199		66,257,199	50	48.58
2	7	2	2.01	1		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen			0.25			0.25		0.5				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50	48.58
Predikat Kinerja																			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																			50	48.58
Predikat Kinerja																			SR	SR
2	7	3				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1,217,293,000			141,800,308			248,474,938		390,275,246		390,275,246	40.38	32.06

2	7	3				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	28 Persen			5			5		10				35.71	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			826,600,000			134,220,308			178,503,428		312,723,736		312,723,736	67.53	37.83
2	7	3	2.01			Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	4 Paket			1			1		2				50	
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			123,867,000	PAD		252	PAD		2,957,000		3,209,000		3,209,000	92.59	2.59
2	7	3	2.01	2		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	27 Lembaga			0			25		25				92.59	
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			36,000,000	PAD		0	PAD		35,984,343		35,984,343		35,984,343	60	99.96
2	7	3	2.01	3		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	15 Unit			0			9		9				60	
2	7	3	2.01	4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			666,733,000	PAD		133,968,308	PAD		139,562,085		273,530,393		273,530,393	50	41.03
2	7	3	2.01	4		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	80 Orang			20			20		40				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			67.53	37.83
Predikat Kinerja																			S	SR
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			86,410,000			750			3,518,700		4,268,700		4,268,700	50	4.94
2	7	3	2.02			Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	15 Lembaga			0			7		7				46.67	

2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			86,410,000	PAD		750	PAD		3,518,700		4,268,700		4,268,700	50	4.94
2	7	3	2.02	1		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga			0			15		15				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50	4.94
Predikat Kinerja																			SR	SR
2	7	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			178,635,000			2,590,000			17,027,400		19,617,400		19,617,400	44	10.98
2	7	3	2.03			Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap	30 Perizinan			0			11		11				36.67	
2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			178,635,000	PAD		2,590,000	PAD		17,027,400		19,617,400		19,617,400	44	10.98
2	7	3	2.03	1		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	25 Perizinan			0			11		11				44	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			44	10.98
Predikat Kinerja																			SR	SR
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			125,648,000			4,240,000			49,425,410		53,665,410		53,665,410	0	42.71
2	7	3	2.05			Peningkatan Produktivitas Daerah	7 Dokumen			0			0		0				0	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			125,648,000	PAD		4,240,000	PAD		49,425,410		53,665,410		53,665,410	0	42.71
2	7	3	2.05	1		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen			0			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	42.71
Predikat Kinerja																			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																			40.38	32.06
Predikat Kinerja																			SR	SR

2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			652,767,000			4,690,000			275,110,079		279,800,079		279,800,079	87.21	42.86
2	7	4				Persentase Pencari Kerja Yang di Tempatkan	5,90 Persen		0			2.95		2.95					50	
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			348,018,000			1,690,000			220,665,099		222,355,099		222,355,099	95	63.89
2	7	4	2.01			Jumlah Pelayanan Antar Kerja	1003 Orang		300			363		663					66.1	
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			60,000,000	PAD		0	PAD		8,785,000		8,785,000		8,785,000	100	14.64
2	7	4	2.01	1		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	5 Orang		0			5		5					100	
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			100,000,000	PAD		0	PAD		60,070,000		60,070,000		60,070,000	80	60.07
2	7	4	2.01	3		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang		0			400		400					80	
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			78,018,000	PAD		0	PAD		64,795,999		64,795,999		64,795,999	100	83.05
2	7	4	2.01	4		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	16 Orang		0			16		16					100	
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja			110,000,000	PAD		1,690,000	PAD		87,014,100		88,704,100		88,704,100	100	80.64
2	7	4	2.01	5		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	45 Orang		0			45		45					100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			95	63.89
Predikat Kinerja																			ST	R

2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			304,749,000			3,000,000			54,444,980		57,444,980		57,444,980	79.41	18.85
2	7	4	2.03			Jumlah media informasi Pasar Kerja	450 Dokumen			210			100		310				68.89	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			50,000,000	PAD		0	PAD		0		0		0	100	0
2	7	4	2.03	1		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4 Dokumen			4			4		4				100	
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			91,691,000	PAD		3,000,000	PAD		34,445,000		37,445,000		37,445,000	138.22	40.84
2	7	4	2.03	2		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	900 Orang			389			855		1244				138.22	
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja			163,058,000	PAD		0	PAD		19,999,980		19,999,980		19,999,980	0	12.27
2	7	4	2.03	3		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang			0			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			79.41	18.85
Predikat Kinerja																			T	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)																			87.21	42.86
Predikat Kinerja																			T	SR
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2,767,214,000			27,713,000			1,059,763,425		1,087,476,425		1,087,476,425	2439.64	39.3
2	7	5				Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	4,8 Persen			1.2			1.2		2.4				50	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			174,575,000			9,814,000			11,050,000		20,864,000		20,864,000	71.97	11.95

2	7	5	2.01			Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	81 Perusahaan			20			15		35			43.21		
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			91,404,000	PAD		9,814,000	PAD		6,820,000		16,634,000		16,634,000	51.43	18.2
2	7	5	2.01	1		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan			8			10		18			51.43		
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			83,171,000	PAD		0	PAD		4,230,000		4,230,000		4,230,000	92.5	5.09
2	7	5	2.01	3		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan			10			27		37			92.5		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		71.97	11.95	
Predikat Kinerja																		S	SR	
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			2,592,639,000			17,899,000			1,048,713,425		1,066,612,425		1,066,612,425	4807.3	41.14
2	7	5	2.02			Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja	267 Perkara			66			74		140			52.43		
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			199,339,000	PAD		0	PAD		29,311,895		29,311,895		29,311,895	62.5	14.7

2	7	5	2.02	1		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	80 Perkara			20			30		50			62.5	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		119,341,000	PAD		3,572,000	PAD		0		3,572,000		3,572,000	60	2.99
2	7	5	2.02	2		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	90 Perkara			29			25		54			60	
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		46,300,000	PAD		0	PAD		5,660,000		5,660,000		5,660,000	64	12.22
2	7	5	2.02	3		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja			12			20		32			64	
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		191,443,000	PAD		7,477,000	PAD		19,896,500		27,373,500		27,373,500	100	14.3
2	7	5	2.02	4		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga			0			1		1			100	
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		2,036,216,000	PAD		6,850,000	PAD		993,845,030		1,000,695,030		1,000,695,030	23750	49.14
2	7	5	2.02	5		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80 Orang			20			19000		19000			23750	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		4807.3	41.14
Predikat Kinerja																		ST	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 5)																		2439.64	39.3
Predikat Kinerja																		ST	SR

2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10,321,799,959			2,199,735,890			2,430,577,587		4,630,313,477	4,630,313,477	54.41	44.86
2	7	1				Nilai IKM	91 Persen		6.67		67.48		74.15				81.48	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		261,660,000			17,430,200			108,713,250		126,143,450	126,143,450	35.54	48.21
2	7	1	2.01			Nilai AKIP	66,50 Persen		16.62		62.38		79				118.8	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		125,720,000	PAD		14,881,700	PAD		76,855,850		91,737,550	91,737,550	58.82	72.97
2	7	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		5		5		10				58.82	
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		47,507,000	PAD		2,548,500	PAD		24,807,400		27,355,900	27,355,900	33.33	57.58
2	7	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		0		1		1				33.33	
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44,507,000	PAD		0	PAD		7,050,000		7,050,000	7,050,000	50	15.84
2	7	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		1		2				50	
2	7	1	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		43,926,000	PAD		0	PAD		0		0	0	0	0
2	7	1	2.01	10		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		0		0		0				0	

Rata-rata capaian kinerja (%)																			35.54	48.21
Predikat Kinerja																			SR	SR
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,394,921,119			1,604,889,343			1,776,256,260		3,381,145,603		3,381,145,603	68.21	45.72
2	7	1	2.02			Jumlah Laporan	6 Laporan			1			2		3				50	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6,315,906,458	PAD		1,319,264,343	PAD		1,525,299,645		2,844,563,988		2,844,563,988	97.5	45.04
2	7	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan			32			39		39				97.5	
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1,035,521,661	PAD		285,625,000	PAD		240,177,865		525,802,865		525,802,865	57.14	50.78
2	7	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen			4			4		8				57.14	
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			43,493,000	PAD		0	PAD		10,778,750		10,778,750		10,778,750	50	24.78
2	7	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			0.25			0.25		0.5				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			68.21	45.72
Predikat Kinerja																			S	SR
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			329,962,000			41,657,000			119,788,350		161,445,350		161,445,350	53.11	48.93
2	7	1	2.06			Jumlah Laporan Penyediaan/pengadaan barang	856 Laporan			214			214		428				50	
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			52,585,000	PAD		22,435,000	PAD		20,280,000		42,715,000		42,715,000	80	81.23

2	7	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1.4			1		2.4				80	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50,000,000	PAD		3,540,000	PAD		46,000,000		49,540,000		49,540,000	94	99.08
2	7	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1			3.7		4.7				94	
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30,000,000	PAD		0	PAD		21,419,700		21,419,700		21,419,700	70	71.4
2	7	1	2.06	3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			0			0.7		0.7				70	
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30,000,000	PAD		0	PAD		11,560,000		11,560,000		11,560,000	47.14	38.53
2	7	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket			0			3.3		3.3				47.14	
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50,000,000	PAD		10,450,000	PAD		13,948,650		24,398,650		24,398,650	40	48.8
2	7	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1			1		2				40	
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30,000,000	PAD		3,600,000	PAD		5,220,000		8,820,000		8,820,000	50	29.4
2	7	1	2.06	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	596 Dokumen			149			149		298				50	
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10,000,000	PAD		1,632,000	PAD		1,360,000		2,992,000		2,992,000	40	29.92
2	7	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan			3			3		6				40	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			77,377,000	PAD		0	PAD		0		0		0	3.7	0

2	7	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan			0			1		1				3.7	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			53.11	48.93
Predikat Kinerja																			R	SR
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,359,656,840			198,317,872			263,795,208		462,113,080		462,113,080	61.5	33.99
2	7	1	2.08			Laporan Penyediaan Jasa	68 Laporan			17			17		34				50	
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3,329,000	PAD		2,000,000	PAD		1,000,000		3,000,000		3,000,000	96	90.12
2	7	1	2.08	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan			7			2.6		9.6				96	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			919,557,840	PAD		186,977,872	PAD		176,605,208		363,583,080		363,583,080	50	39.54
2	7	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			9			9		18				50	
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			232,200,000	PAD		9,340,000	PAD		29,070,000		38,410,000		38,410,000	50	16.54
2	7	1	2.08	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan			4.5			4.5		9				50	
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			204,570,000	PAD		0	PAD		57,120,000		57,120,000		57,120,000	50	27.92
2	7	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			0			2		2				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			61.5	33.99
Predikat Kinerja																			R	SR

2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		975,600,000			337,441,475			162,024,519		499,465,994		499,465,994	53.67	51.2
2	7	1	2.09			Laporan Pemeliharaan	176 Laporan			44		44		88				50	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		135,000,000	PAD		28,525,000	PAD		7,860,000		36,385,000		36,385,000	41.67	26.95
2	7	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit			0		10		10				41.67	
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		84,100,000	PAD		6,733,880	PAD		8,911,134		15,645,014		15,645,014	33.33	18.6
2	7	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			0		1		1				33.33	
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		181,500,000	PAD		154,754,195	PAD		18,209,975		172,964,170		172,964,170	50	95.3
2	7	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			8		7		15				50	
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		525,000,000	PAD		147,428,400	PAD		81,427,060		228,855,460		228,855,460	70	43.59
2	7	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			0.3		0.4		0.7				70	
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50,000,000	PAD		0	PAD		45,616,350		45,616,350		45,616,350	73.33	91.23

2	7	1	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit			0			33		33				73.33	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			53.67	51.2
Predikat Kinerja																			R	R
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																			54.41	44.86
Predikat Kinerja																			R	SR

Tabel T-C-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda s/d Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Disnaker Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	91 Persen	87,5 Persen	90,5 Persen	87,85 Persen	97,07	91 Persen	276,2	3,04
	2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70Persen	65,50%	66,50 Persen	66,50 Persen	100	66,50 Persen	198,5	2,84
	2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2	2

	2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2	2
	2	7	1	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	-	-	-	-	2 Berita Acara	2	1
	2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100	24 Laporan	72	3
	2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	34 Orang/Bulan	85	40 Orang/bulan	114	2,85
	2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Orang/Bulan	100	14 Dokumen	42	3
	2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3	3
	2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan/pengadaan barang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	100	12 Laporan	36	3
	2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	9	3

	2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	-	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	10	2
	2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3	3
	2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6 Paket	6 Paket	100	7 Paket	18	3,6
	2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	15	3
	2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100	50 Dokumen	150	3
	2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100	15 Laporan	45	3
	2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	20 Laporan	60	3
	2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	30	3
	2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	30	3
	2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	108	3
	2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	15 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	18 Laporan	51	2,83

	2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12	3
	2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	30 Laporan	12 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100	30 Laporan	72	2,4
	2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	10 Unit	24 Unit	24 Unit	100	24 Unit	58	2,42
	2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	3 Unit	3 Unit	100	5 Unit	13	2,6
	2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100	30 Unit	90	3
	2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3	3
	2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5 Unit	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	19	2,71
2	2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
	2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3

	2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
3	2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	26 Persen	27 Persen	27 Persen	100	28 Persen	81	2,89
	2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	4 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	10	2,5
	2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	25 Lembaga	-	25 Lembaga	25 Lembaga	100	27 Lembaga	52	2,08
	2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	20 Unit	16 Unit	20 Unit	31 Unit	155	8 Unit	55	2,75
	2	7	3	2.01	4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	64 Orang	32 Orang	64 Orang	64 Orang	100	80 Orang	176	2,75
	2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK Swasta yang dibina	14 Lembaga	-	14 Lembaga	14 Lembaga	100	14 Lembaga	28	2
	2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	-	14 Lembaga	14 Lembaga	100	20 Lembaga	34	1,7
	2	7	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap	30Perizinan	-	30 Perizinan	30 Perizinan	100	30 Perizinan	60	2
	2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan	-	30 Perizinan	30 Perizinan	100	30 Perizinan	60	2

	2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas Daerah	10 Perusahaan	-	10 Perusahaan	15 Perusahaan	150	10 Perusahaan	25	2,5
	2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumenn	100	7 Dokumen	17	2,43
4	2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang di Tempatkan	5,90 Persen					5,90 Persen		
	2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	375Orang	375 Orang	375 Orang	375 Orang	100	375 Orang	1125	3
	2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang	30 Orang	3 Orang	3 Orang	100	30 Orang	63	2,1
	2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	-	400 Orang	300 Orang	75	500 Orang	800	1,6
	2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	16 Orang	-	16 Orang	41 Orang	256,25	16 Orang	57	3,56
	2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	60 Orang	22 Orang	30 Orang	136,36	60 Orang	150	3,75
	2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah media informasi Pasar Kerja	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	100	4 Media	12	3

	2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
	2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	900 Orang	900 Orang	900 Orang	100	900 Orang	2700	2,7
	2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	172 Orang	150 Orang	150 Orang	100	200 Orang	522	1,74
5	2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	4,8 Persen					4,8 Persen		
	2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	50Perusahaan	40 Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100	40 Perusahaan	110	2,2
	2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	-	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100	40 Perusahaan	70	1,75

	2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	100	40 Laporan	120	3
	2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja	40 Perkara	40 Perkara	40 Perkara	40 Perkara	100	40 Perkara	120	3
	2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	40 Perkara	40 Perkara	40 Perkara	100	40 Perkara	120	3
	2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	40 Perkara	600 Perkara	60 Perkara	100	40 Perkara	140	3,5
	2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	23	1,53

	2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100	1 Lembaga	4	4
	2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	70 Orang	70 Orang	70 Orang	19000 Orang	100	19000 Orang	210	3
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Pperencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	17 Dokumen	29	4,14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas terdiri atas

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan jaminan Sosial terdiri atas Kelompok jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial dan transmigrasi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi meliputi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial dan transmigrasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi meliputi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial dan transmigrasi
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Sekretariat, Bidang dan UPTD adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas dan pengelolaan Barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dan membawahi kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
2. Penyusunan bahan Rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum

3. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana
4. Pengordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Pengordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
6. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan dan Layanan informasi dan pengaduan
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
9. Pengelolaan anggaran dan penerimaan/retribusi
10. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai
11. Pelaksanaan verifikasi Surat pertanggungjawaban keuangan
12. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
13. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedr (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat/pelanggan
15. Pengelolaan pengaduan Masyarakat sesuai tugas fungsi
16. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu
17. Pengordinasian pengelolaan data, Pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas
18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
19. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan dan

20. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
2. Menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya
3. Melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor
4. Memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas
5. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian
6. Mengkoordinir dan Menyusun bahan Kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas
8. Melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas
9. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, Pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas
10. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah

12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan /pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya
2. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja) Dinas
3. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja)
4. Mengkoordinir dan memfasilitasi penyusunan Indikator Kinerja Individu dari seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
5. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas
6. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
7. mengkoordinir pengumpulan data dari seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas sebagai bahan dokumen dan pelaporan Dinas;
8. mengkoordinir laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
9. mengkoordinir penyusunan pra RKA/RKA/RKA perubahan/DPA/DPPA Dinas;
10. menyusun laporan tahunan kinerja Dinas;
11. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan
12. kegiatan Dinas;
13. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

14. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan inventarisasi barang milik daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
15. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
16. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
18. melaksanakan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
19. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
20. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
21. menyusun neraca keuangan dinas;
22. mengkoordinir dan menyusun anggaran dinas;
23. menyusun laporan keuangan dinas;
24. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
25. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
26. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemagangan;
4. Penyebarluasan informasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada Lembaga pelatihan kerja, asosiasi profesi, industri dan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
6. Pembinaan perizinan lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi profesi;
7. Penyediaan sumber daya perijinan lembaga pelatihan kerja
8. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
9. Pengkoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat kota;
10. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. pelaksanaan penyusunan data pencari kerja dan data lowongan kerja;
3. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja;
4. pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;
5. pelaksanaan pemberian persetujuan pendirian Lembaga Bursa Kerja Khusus;

6. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja / job fair;
7. pemberian fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
8. pelaksanaan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota;
10. penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;
11. pelaksanaan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK);
12. pemberian pelayanan kelengkapan dokumen calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
13. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketrasmigrasian;
14. pelaksanaan klarifikasi permukiman daerah tujuan transmigrasi;
15. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan jaminan Sosial terdiri atas Kelompok jabatan Fungsional

Bidang Hubungan Industrial, syarat kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Pengkoordinasian pemberian pelayanan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Lembaga Kerja Sama Tripartit, program KB di perusahaan untuk pekerja dan pengusaha menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
4. Pembuatan Perjanjian Kerja (PK); Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
5. Pembinaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengupahan dan jaminan sosial;
6. Sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan serta monitoring upah minimum kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP);
7. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok berdasarkan sifat dan keahliannya, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Rencana Tenaga Kerja Samarinda	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kopetensi	26	27	28	29	26	24,21	28	29	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,6	6,2	5,9	5,5	5,92	5,95	5,9	5,5	
4	Program Hubungan Industrial		Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	50	49	48	47	50	51,3	48	47	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai IKM	90	90,5	91	91,5	90	87,85	91	91,5	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Isu-isu penting dalam Renja disusun berdasarkan beberapa sumber, berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan di kota Samarinda, bersumber dari permasalahan isu dalam rangka pembangunan jangka panjang daerah Kota Samarinda dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda prioritas pembangunan, dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut dapat diangkat menjadi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tenaga kerja lokal yang bersifat keahlian.
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM.
3. Belum optimalnya penyampaian informasi kepada pencari kerja.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain :

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan Kompetensi Pencari Kerja ;
2. Kurangnya Tenaga Instruktur dan Pengembangan lembaga pelatihan yang tidak sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan;
3. Kurangnya pengembangan produktivitas pada perusahaan mikro, kecil dan menengah UMKM serta Wirausaha Baru;
4. Tingkatnya pengangguran terbuka yang cukup tinggi, ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan dan terbatasnya kesempatan kerja, tingkat pelaporan yang tidak akurat, serta banyaknya perusahaan yang tidak memahami dan menjalankan peraturan ketenagakerjaan menyebabkan banyaknya perselisihan perusahaan dan rendahnya/ kurangnya kesejahteraan pekerja, dan serikat buruh.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari isu strategis dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam 5 Program 14 Kegiatan 38 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif RKPD 2025 Rp. 13.829.401.796,- menjadi Pagu Indikatif Perubahan 2025 Rp. 13.937.11.838,-

Adapun rincian program dan kegiatan yang mengalami perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

KOTA, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, dengan Kegiatan :
 - 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- C. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, dengan Kegiatan :
 - 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
 - b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
 - c. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi.
- 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
- 4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- D. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, dengan Kegiatan :
 - 1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - c. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - d. Perluasan Kesempatan Kerja
 - 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - b. Job Fair/Bursa Kerja
- E. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, dengan Kegiatan :
 - 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

- b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,
 - b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,
 - c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliat,
 - d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota,
 - e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja,

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA)
DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	PRIORITAS		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	16	17	20
		DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA				13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00	18.525.297.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00			18.525.297.000,00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00			18.525.297.000,00
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Persen	79,00 Nilai 88,00 Indeks	10.820.101.796,00	10.321.799.959,00	9.782.560.213,00	3.675.195.204,00			14.495.297.000,00
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	66,50 Persen	100 %	277.000.000,00	261.660.000,00	191.040.000,00	-85.960.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	250.000.000,00
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	0,00	125.720.000,00	108.138.000,00	108.138.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	100.000.000,00
	2	NON URUSAN				13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00			18.525.297.000,00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00			18.525.297.000,00
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00			18.525.297.000,00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00			18.525.297.000,00
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	47.507.000,00	42.521.000,00	-7.479.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	50.000.000,00
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	4 Laporan	47.000.000,00	44.507.000,00	40.381.000,00	-6.619.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	50.000.000,00
	2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Berita Acara	0 Berita Acara	50.000.000,00	43.926.000,00	0,00	-50.000.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	50.000.000,00
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang disusun dan di laporkan secara tepat waktu</i>	6 Laporan	100 %	7.922.514.212,00	7.394.921.119,00	7.092.604.223,00	-829.909.989,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	10.350.000.000,00
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	40 Orang/bulan	41 Orang/bulan	6.737.489.212,00	6.315.906.458,00	6.025.839.187,00	-711.650.025,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	8.700.000.000,00
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	14 Dokumen	14 Dokumen	1.135.025.000,00	1.035.521.661,00	1.035.521.661,00	-99.503.339,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	1.600.000.000,00
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	43.493.000,00	31.243.375,00	-18.756.625,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	50.000.000,00

	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	856 Laporan	100 %	402.585.000,00	329.962.000,00	303.608.875,00	-98.976.125,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	1.146.441.000,00
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	52.585.000,00	52.585.000,00	52.585.000,00	0,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	65.000.000,00
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	91.000.000,00	-9.000.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	421.441.000,00
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	30.000.000,00
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	30.000.000,00
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	29.735.375,00	-20.264.625,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	120.000.000,00
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	596 Dokumen	596 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	21.600.000,00	-8.400.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	50.000.000,00
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	15 Laporan	15 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	30.000.000,00
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	27 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	77.377.000,00	38.688.500,00	-61.311.500,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	400.000.000,00

	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP</i>	68 Laporan	100 %	1.242.402.584,00	1.359.656.840,00	1.116.600.865,00	-125.801.719,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	1.501.000.000,00
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10 Laporan	10 Laporan	3.329.000,00	3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	1.000.000,00
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan	36 Laporan	906.873.584,00	919.557.840,00	819.557.840,00	-87.315.744,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	1.100.000.000,00
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	18 Laporan	18 Laporan	232.200.000,00	232.200.000,00	89.144.025,00	-143.055.975,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	150.000.000,00
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	204.570.000,00	204.570.000,00	104.570.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	250.000.000,00
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi baik</i>	176 Laporan	100 %	975.600.000,00	975.600.000,00	1.078.706.250,00	103.106.250,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	1.247.856.000,00
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	24 Unit	20 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	176.370.000,00	41.370.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	180.000.000,00
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	2 Unit	84.100.000,00	84.100.000,00	71.606.250,00	-12.493.750,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	84.100.000,00
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	30 Unit	30 Unit	181.500.000,00	181.500.000,00	258.580.000,00	77.080.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	405.053.000,00
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	525.000.000,00	525.000.000,00	522.150.000,00	-2.850.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	500.000.000,00
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	45 Unit	7 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	78.703.000,00
1,	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	64,29 %	144.800.000,00	136.399.000,00	119.597.000,00	5.200.000,00			150.000.000,00
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Jumlah Dokumen RTK yang disusun dan di fasilitasi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	144.800.000,00	136.399.000,00	119.597.000,00	-25.203.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	150.000.000,00
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro										

			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	144.800.000,00	136.399.000,00	119.597.000,00	-25.203.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	150.000.000,00
2,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %	1.336.000.000,00	1.217.293.000,00	944.109.875,00	544.000.000,00			1.880.000.000,00
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Jumlah pelatihan / Unit Kompetensi yang dilaksanakan</i>	4 Paket	4 Paket	886.000.000,00	826.600.000,00	716.878.375,00	-169.121.625,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	1.210.000.000,00
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	27 Lembaga	25 Lembaga	150.000.000,00	123.867.000,00	74.131.000,00	-75.869.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	150.000.000,00
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota										

			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	15 Unit	15 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	0,00
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	-	9 Unit	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	250.000.000,00
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi										
			<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>	80 Orang	80 Orang	700.000.000,00	666.733.000,00	606.747.375,00	-93.252.625,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	810.000.000,00

	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Jumlah kegiatan pembinaan kepada LPK Swasta yang dilaksanakan</i>	15 Lembaga	1 Kegiatan	100.000.000,00	86.410.000,00	49.535.000,00	-50.465.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	245.000.000,00
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	30 Lembaga	10 Lembaga	100.000.000,00	86.410.000,00	49.535.000,00	-50.465.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	245.000.000,00
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap</i>	30 Perizinan	10 LPK	200.000.000,00	178.635.000,00	104.642.375,00	-95.357.625,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	200.000.000,00
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi										

			<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	25 Perizinan	13 Perizinan	200.000.000,00	178.635.000,00	104.642.375,00	-95.357.625,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	200.000.000,00
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersusunnya Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah</i>	7 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	125.648.000,00	73.054.125,00	-76.945.875,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	225.000.000,00
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja										
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	7 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	125.648.000,00	73.054.125,00	-76.945.875,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	225.000.000,00
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	5,90 Persen	16,17 %	665.000.000,00	652.767.000,00	600.806.875,00	90.000.000,00			755.000.000,00

	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Antar Kerja	1003 Orang	2000 Orang	350.000.000,00	348.018.000,00	320.431.500,00	-29.568.500,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	390.000.000,00
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja										
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	5 Orang	30 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	48.152.500,00	-11.847.500,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	60.000.000,00
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja										
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	700 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	99.489.250,00	-510.750,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	100.000.000,00
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan										

			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	16 Orang	18 Orang	80.000.000,00	78.018.000,00	72.523.500,00	-7.476.500,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	80.000.000,00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja										
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	45 Orang	45 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	100.266.250,00	-9.733.750,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	150.000.000,00
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah data pasar kerja yang dihimpun</i>	450 Dokumen	450 Dokumen	315.000.000,00	304.749.000,00	280.375.375,00	-34.624.625,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	365.000.000,00
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online										

			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	50.000.000,00
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online										
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	900 Orang	2000 Orang	100.000.000,00	91.691.000,00	72.767.875,00	-27.232.125,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	150.000.000,00
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja										
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	150 Orang	150 Orang	165.000.000,00	163.058.000,00	157.607.500,00	-7.392.500,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	165.000.000,00

4,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %	863.500.000,00	2.767.214.000,00	2.490.037.875,00	381.500.000,00			1.245.000.000,00
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	81 Perushaan	50 Perushaan	200.000.000,00	174.575.000,00	108.414.125,00	-91.585.875,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	225.000.000,00
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan										
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perushaan	35 Perushaan	100.000.000,00	91.404.000,00	51.820.125,00	-48.179.875,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	100.000.000,00
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan										

			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	40 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	83.171.000,00	56.594.000,00	-43.406.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	125.000.000,00
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja yang berhasil dikelola / ditangani</i>	267 Perkara	100 Perkara	663.500.000,00	2.592.639.000,00	2.381.623.750,00	1.718.123.750,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	1.020.000.000,00
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	80 Perkara	80 Perkara	237.000.000,00	199.339.000,00	126.686.000,00	-110.314.000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	400.000.000,00
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										

			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>	90 Perkara	100 Perkara	125.000.000,00	119.341.000,00	82.423.500,00	-42.576.500,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	125.000.000,00
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi										
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	55.000.000,00	46.300.000,00	21.753.500,00	-33.246.500,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	150.000.000,00
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	1 Lembaga	201.500.000,00	191.443.000,00	138.826.375,00	-62.673.625,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	300.000.000,00
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja										

			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	80 Orang	19.000 Orang	45.000.000,00	2.036.216.000,00	2.011.934.375,00	1.966.934.375,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	45.000.000,00
			J U M L A H			13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	814.903.879.571,00			18.525.297.000,00

BAB IV

Penutup

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mendeskripsikan berbagai kegiatan yang direncanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran sebagai wujud nyata dari pelaksanaan program-program yang sesuai dengan Visi, Misi dan program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029. Pelaksanaan program kerja mengacu pada tuntutan paradigma baru yang harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

P-Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Diharapkan P-Renja juga menjadi dasar yang kompeten dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemutus kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja yang optimal.

Samarinda, Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas



Sofyan Ady Wijaya, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I IV/b

NIP.196907222000121001